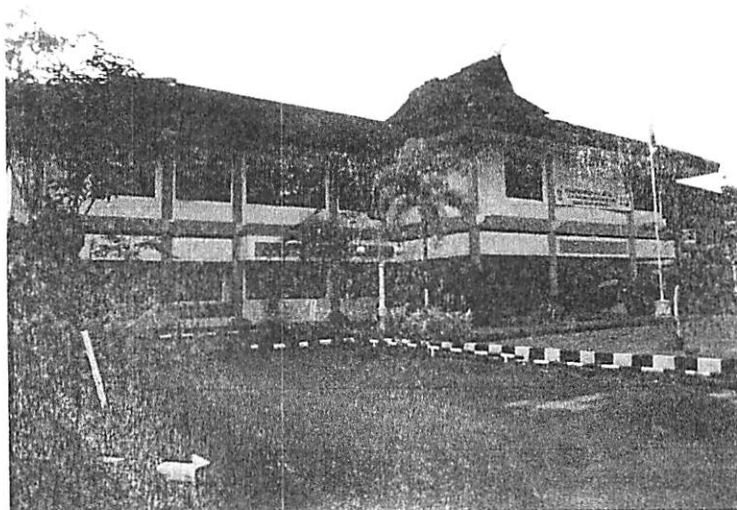


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014**

**DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**



**DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan Rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun anggaran 2014 dapat terselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi Pemerintah Kota Balikpapan

Berakhirnya Implementasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2014 ditindaklanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan berdasarkan kinerja atau prestasi kerja masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2014 diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stakeholders*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran serta hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan amanat Visi dan Misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan yaitu "Terwujudnya Tata Ruang Kota yang Produktif dan Berkelanjutan".

LAKIP ini secara garis besar berisi Informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian terget dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2014. termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran strategis program dan kegiatan Tahun Anggaran 2014 diantaranya adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunami dan Rusunawa)
3. Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
4. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan
5. Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
6. Terkendalinya pemanfaatan ruang

Sangat di sadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolak ukur terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan sebagai wujud pertanggung jawaban kepada Walikota Balikpapan dan Masyarakat.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN



KETUT ASTANA
Pembina Utama Muda
Nip. 19611202 199203 1 005

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LANDASAN HUKUM	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. DATA ORGANISASI	1
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)	4
1. VISI DAN MISI	4
a. VISI	4
b. MISI	4
2. TUJUAN DAN SASARAN	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
B. PENGUNGKAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	10
BAB IV PENUTUP	12
KESIMPULAN	12

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN HUKUM

Dasar pembentukan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan.

Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam konteks penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan yang mengacu pada Visi dan Misi Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 yaitu Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman.

MAKSUD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Kota Dan Perumahan adalah sebagai Dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program, sasaran strategis dan kebijakan keuangan yang ingin dicapai.

TUJUAN

1. Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni.
2. Menyediakan ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

C. DATA ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, tugas pokok dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang penataan kota dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008, fungsi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penataan kota dan perumahan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
- b. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang penataan kota dan perumahan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tata ruang dan tata bangunan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang perumahan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan bangunan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pelaksana unit pelaksanaan teknis dinas;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

❖ ASPEK STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Perumahan di kawasan Permukiman Kumuh
2. Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)
3. Terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan
4. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan.
5. Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau – pulau kecil
6. Terkendalinya pemanfaatan ruang

❖ Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan membawahkan :

- a. Seksi Tata Ruang; dan
- b. Seksi Tata Bangunan

4. Bidang Perumahan membawahkan :

- a. Seksi Penataan Perumahan Swadaya; dan
- b. Seksi Penataan Perumahan Formal.

5. Bidang Pengawasan Bangunan membawahkan :

- a. Seksi Pengawasan Bangunan Perumahan dan Permukiman; dan
- b. Seksi Pengawasan Bangunan Umum.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas :

- a. UPT Rumah Susun Sewa.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Sumber Daya Manusia

Dinas Tata Kota dan Perumahan Per 31 Desember 2014 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 68 (Enam puluh delapan) orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terdapat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Tingkat Pendidikan SDM Dinas Tata Kota dan Perumahan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1.	Pasca Sarjana (S2)	9	13,23
2.	Sarjana (S1)	23	33,82
3.	Sarjana Muda (D3)	5	7,35
4.	SLTA	28	41,17
5.	SLTP	2	2,94
6.	SD	1	1,47
	J U M L A H	68	100

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Strategis Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011 – 2016 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan Program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional, Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan, yaitu :

1. VISI DAN MISI

a) Visi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah “TERWUJUDNYA TATA RUANG KOTA YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN.”

b) Adapun Misi Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota.
2. Mewujudkan Kawasan Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas.
3. Membangun Sistem Pengawasan Bangunan Yang Efektif.
4. Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Kemudian untuk berhubungan dengan misi Kota Balikpapan yaitu pada point nomor 3 (tiga) yaitu mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan untuk misi Kota Balikpapan, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sehat jasmani dan memiliki daya saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi

2. Mewujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan.
3. Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi kota di masa depan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
6. Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Kemudian tujuan dan sasaran, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Tata Kota Dan Perumahan Kota Balikpapan dalam jangka waktu tertentu, merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

TUJUAN adalah

1. Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni
Sasarannya:
 - 1) Meningkatkan kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh
 - 2) Mewujudkan penyediaan hunian vertical
 - 3) Mewujudkan tujuan sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat
2. Meningkatkan kalitas perencanaan tata ruang
Sasarannya adalah meningkatnya kualitas penataan ruang
3. Menyediakan struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Sasarannya adalah peningkatan luas wilayah budidaya
4. Meningkatkan kesesuaian dengan rencana tata ruang
Sasarannya adalah meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap tata ruang kota
5. Menerapkan ketertiban tata bangunan
Sasarannya adalah meningkatnya kesadaran akan bangunan yang aman dan nyaman

6. Meningkatkan kinerja aparatur dan optimalisasi pelayanan pada masyarakat

Sasarannya:

- 1) Implementasi SPM (standar pelayanan minimal) dan pemberian layanan prima bidang pemanfaatan dan pengendalian ruang serta bangunan**
- 2) Kedisiplinan pegawai**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengungkapan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja mencakup Pencapaian Kinerja Dinas Tata Kota dan Perumahan seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
1.	Meningkatnya kualitas Perumahan di kawasan perumahan kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	11.550 Unit	27,965 unit	79,98%

1. Berdasarkan uraian sasaran strategis No. 1 yaitu dengan meningkatnya kualitas perumahan di kawasan permukiman kumuh, maka permukiman masyarakat menjadi lebih baik, sehingga kehidupan di masyarakat menjadi lebih baik dan sehat sejahtera.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
2.	Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunawa dan Rusunami)	1. Jumlah Rusunami	Unit	0 Unit	0	0
		2. Jumlah Rusunawa	Unit	Terbangunnya Rusunawa 1 Unit	1 unit	100 %

2. Berdasarkan uraian sasaran strasegis No. 2 yaitu dengan terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunami dan Rusunawa), maka Tata Ruang Kota lebih tertata rapi sehingga pembangunan lebih indah dan rapi.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
3.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1.	Unit	1.419 unit	8.372 unit	589,99 %
		Prosentase rumah tinggal bersanitasi				
		2.	%	0,01%	0,056 %	560 %
		Prosentase kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman				

3. Berdasarkan uraian sasaran strategis No. 3 yaitu dengan Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, maka kehidupan serta lingkungan di masyarakat menjadi lebih bersih kemudian masyarakat menjadi lebih sehat sehingga sesuai yang diinginkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
4.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan	1.	paket	2	0	0
		Jumlah rencana tata ruang kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah				
		2.	%	0	0	0
		Prosentase rencana tata ruang kota Balikpapan				

		3. Jumlah dokumen-dokumen perencanaan tata ruang	paket	1	4	400 %
		4. Jumlah luas wilayah hutan lindung	ha	17.441 ha	0	0
		5. Jumlah luas wilayah ruang terbuka hijau	ha	3.385 ha	0	0

4. Berdasarkan uraian sasaran strategis No. 4 yaitu Tersedianya Struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka masyarakat dapat merasakan pola ruang kota yang berkawasan lingkungan serta sehat serta berkawasan berkelanjutan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
5.	Tersedianya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil	1. Jumlah luas wilayah budidaya pesisir	ha	2 %	0	0

5. Berdasarkan uraian sasaran strategis No. 5 yaitu dengan Tersedianya Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau kecil, maka masyarakat dapat menikmati keindahan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di Kota Balikpapan dengan nyaman.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Realisasi	Pencapaian Target (%)
		Uraian	Satuan	Target		
6.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	1. Prosentase bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan	%	73 %	84,93%	116,34 %

	2. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	%	75 %	80 %	106,66 %
	3. Jumlah bangunan umum	Unit	300 Unit	195	65,0%
	4. Jumlah bangunan perumahan	Unit	350 Unit	366 Unit	104,6 %

6. Berdasarkan uraian sasaran strategis No.6 dengan Terkendalinya Pemanfaatan Ruang, maka dilingkungan serta kehidupan di masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana tata ruang kota.

B. Pengungkapan Akuntabilitas Keuangan

Capaian Akuntabilitas Keuangan Persasaran :

No.	Sasaran	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatkan kualitas perumahan di kawasan perumahan kumuh	Rp. 4.050.000.000	Rp 2.250.050.822	1,79 %
2.	Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)	Rp. 0	0	0
3.	Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	Rp. 4.230.000.000	0	0
4.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan	Rp. 1.600.000.000	Rp. 823.935.000	51,69%

5.	dan berkelanjutan Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	100%
6.	Terkendalinya pemanfaatan ruang	Rp. 3.865.935.000	Rp. 1.361.477.500	35,21%
		Rp. 13.945.935.000		

(Tiga belas milyar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

❖ **Belanja Langsung**

Alokasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 sebesar Rp.24.940.762.600,- dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014 dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.567.249.511,- atau 78,45 % , Sisa anggaran sejumlah Rp. 5.373.513.089,-

❖ **Belanja Tidak Langsung**

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) dalam Tahun Anggaran 2014 ini sebesar Rp.5.951.950.000,- sampai dengan akhir Tahun Anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp.5.124.662.351,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp.827.287.649,- atau 86,10 %.

Tabel Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1.	Belanja Pegawai dan Tunjangan Lainnya.	5.951.950.000,-	5.124.662.351,-	86,10	627.287.649,-

Tabel Realisasi Belanja Langsung

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
2.	Belanja Langsung	24.940.762.600,-	19.597.249.511,-	78,45	5.373.513.089,-

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Tugas pokok dan fungsi, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan didalam pelaksanaan urusan wajib bidang penataan ruang, perumahan dan permukiman serta pengawasan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman di dalam penyelenggaraan dan pengendalian penataan ruang serta perumahan dan permukiman.

Adapun kesimpulannya adalah :

1. Dengan Meningkatnya Kualitas Perumahan Dikawasan Permukiman Kumuh, maka permukiman masyarakat menjadi sehat sejahtera.
2. Kemudian dengan terwujudnya penyediaan hunian Vertikal (Rusunami dan Rusunawa), Sehingga Pemanfaatan tata ruang kota lebih tertata rapi.
3. Kemudian dengan terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, maka lingkungan permukiman menjadi bersih dan sehat sesuai yang diinginkan / diharapkan.
4. Dengan tersedianya struktur pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka masyarakat dapat merasakan pola ruang kota yang sehat serta ramah lingkungan.
5. Dengan tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, maka masyarakat dapat menikmati keindahan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di kota Balikpapan dengan nyaman.

6. Dengan terkendalinya pemanfaatan ruang, maka di lingkungan serta kehidupan di masyarakat dapat menikmati sarana dan prasarana tata ruang kota.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat. Terima Kasih.

Balikpapan, Februari 2015

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN



KETUT ASTANA

Rembina Utama Muda

Nip. 19611202 199203 1 005



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*good governance*), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAIMIN**

Jabatan : **KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H.M. RIZAL EFFENDI**

Jabatan : **WALIKOTA BALIKPAPAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji :

1. Akan mewujudkan target kinerja tahun 2014 sesuai lampiran perjanjian ini dalam mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
2. Untuk lebihantisipasi, meningkatkan partisipasi dan lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan target kinerja sebagaimana angka 1 per 6 bulan kepada Walikota.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama dan pihak pertama bersedia menerima sanksi atas kegagalan dalam pencapaian kinerja.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan, 27 Januari 2014

Pihak Kedua,



H.M. RIZAL EFFENDI

Pihak Pertama,

MUHAIMIN

PENETAPAN KINERJA

SKPD
Tahun Anggaran

: Dinas Tata Kota dan Perumahan
: 2014

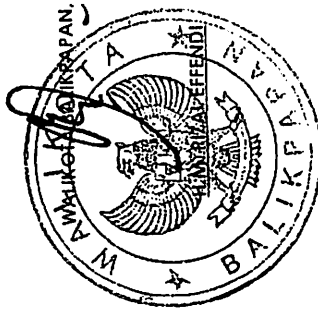
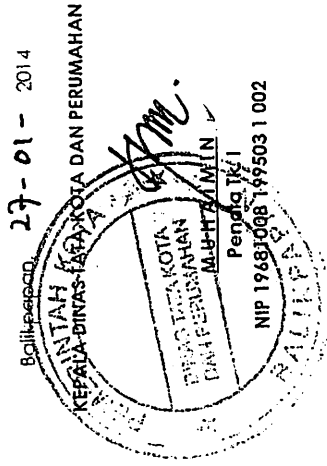
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas perumahan di kawasan perumahan kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni	rumah tidak layak huni berkurang sebesar 0,01%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 4,050,000,000
	2. Jumlah pembangunan rumah sederhana untuk PNS Kota Balikpapan	Rumah sederhana untuk PNS terbangun 100 unit	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Rp -
Terwujudnya penyediaan hunian vertikal (Rusunawa dan Rusunami)	1. Jumlah Rusunami	0 unit	Program Pengembangan Rumah Susun	Rp -
	2. Jumlah Rusunawa	Terbangunnya Rusunawa 1 unit	Program Pengembangan Rumah Susun	Rp -
Terwujudnya sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat	1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Rumah bersanitasi meningkat 1%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 980,000,000
	2. Prosentase kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman	Kawasan kumuh berkurang 0,01%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 3,250,000,000
Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Jumlah rencana tata ruang kota Balikpapan menjadi Peraluran Daerah	0	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp -
	2. Prosentase rencana tata ruang kota Balikpapan	0	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp -
	3. Jumlah dokumen - dokumen perencanaan tata ruang	Tersusunnya 5 buah dokumen perencanaan.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp 1,600,000,000
	4. Jumlah luas wilayah hulan lindung	0	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp -
	5. Jumlah luas wilayah ruang terbuka hijau		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp -
Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau - pulau kecil	1. Jumlah luas wilayah budidaya pesisir	0	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 200,000,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
1. Peningkatan pemanfaatan ruang	1. Prosentase bangunan ber-ITAB dengan solusi bangunan	bangunan ber-ITAB meningkat 2%	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 1.470.000.000
	2. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	keesuaian dengan lataruang meningkat 2%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 2.395.935.000
	3. Jumlah bangunan umum	meningkat 300 unit	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
	4. Jumlah bangunan perumahan	meningkat 500 unit	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

Jumlah Anggaran Program

Rp 13.945.935.000

(Tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN

Jl. Ruhui Rahayu I No. 10 Telp. (0542) 874091 Fax. (0542) 874085
Balikpapan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 050/143/DTKP-Set IV/2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011-2016

KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA BALIKPAPAN.

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang termuat dalam RENSTRA Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengatur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya.
 - b. Bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959)
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan pemerintahan Antara pemerintah, pemerintah urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014).
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tentang Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian atau Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008).
10. Perda Npmor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah.
11. Peraturan Walikota Balikpapan, Nomor : 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, Tugas pokok dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan adalah melaksanakan Urusan Rumah tangga Daerah dibidang penataan Kota dan Perumahan Berdasarkan asas dan tugas pembantuan.
12. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTABALIKPAPAN TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan yang Berisi Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2011-2016 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan di kawasan permukiman Kumuh	1. Jumlah rumah tidak layak huni	Laporan Pelaksanaan kegiatan
2.	Terwujudnya penyediaan hunian vertical (Rusunawa dan Rusunami)	2. Jumlah pembangunan rumah sederhana PNS Kota Balikpapan	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
3.	Terwujudnya Sanitasi sehat yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.	1. Jumlah Rusunami	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		2. Jumlah Rusunawa	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		1. Prosentase rumah tinggal bersanitasi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan
		2. Prosentase Kawasan kumuh terhadap kawasan permukiman	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

4.	Tersedianya struktur dan pola ruang yang berkawasan lingkungan dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rencana tata ruang kota Balikpapan menjadi menjadi peraturan daerah 2. Prosentase rencana tata ruang Kota Balikpapan menjadi Peraturan Daerah 3. Jumlah dokumen perencanaan tata ruang 4. Jumlah luas wilayah hutan lindung 5. Jumlah luas wilayah ruang terbuka hujan 	<p>Laporan Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
5.	Tersedianya tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luas wilayah budidaya pesisir 	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p>
6.	Terkendalinya pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase bangunan ber-IMB dengan satuan bangunan 2. Prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 3. Jumlah Bangunan Umum 4. Jumlah Bangunan Perumahan 	<p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p> <p>Laporan Hasil Kegiatan</p>

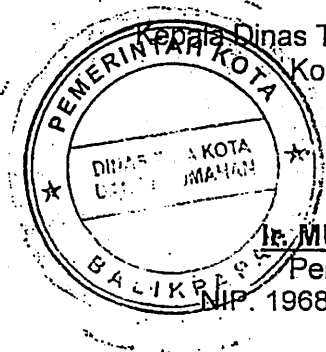
Pasal 2

Unit kerja lingkungan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Balikpapan dalam merencanakan program, kegiatan dan indicator kinerjanya wajib mengacupada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 yang diatur dalam surat Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : Mei 2013



Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Balikpapan

Handwritten signature

E. MUHAIMIN.MT

Pembina Tk. I

NIP. 19681008 199503 1 002

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
KOTA BALIKPAPAN**

KEPALA DINAS
Ir. I Ketut Astana, MM
NIP. 19611202 199203 1 005

SEKRETARIS
Ir. Andar Listiani, MMT
NIP. 196404171992032006

KELOMPOK JAFUNG

**KEPALA SUB. BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM**
Hj. Yusrilh, SE, Msi
NIP. 19620213 198903 2 007

- Kasmawati Wiaya
NIP. 19591015 198002 2 003
- Rita Mawarna
Naban

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
Ir. Alghazali
NIP. 19631208 199203 1 005

- Masriyah
NIP. 19581127 199310 2 001
- Rita Riani
NIP. 19760105 200701 2 014
- Mohamad Rauf
NIP. 19771024 200112 1 003
- Meiliani, SE,
NIP. 19770522 201001 2 008
- Rachmadi Fauzi
NIP. 19790424 201001 1 013
- Dany Purwoko
Naban
- Achmad Hussaini
Naban
- Arung Desilia P. SE
Naban
- Syahrim
Naban
- Yusi Rachmadani Yulhya
Naban
- Fitriana
Naban
- Fitriyadi
Naban

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
Dini Chandrawati SE
NIP. 19670309 198902 2 004

- Sumarti
NIP. 19590810 198601 2 002
- Mulyani
NIP. 19731212 201001 2 005
- Mnsitah
NIP. 19580507 198601 2 001
- Biyadi
NIP. 19710911 201212 1 001

**KEPALA BIDANG TATA RUANG
DAN TATA BANGUNAN**
Ady Yulius S.Pt.MT
NIP. 19743007 200012 1 002

KEPALA BIDANG PERUMAHAN
Suparto, ST, MSI
NIP. 19680727 199703 1 003

KEPALA BIDANG PENGAWASAN
Eri Santoso, ST, MT
NIP. 19730411 199903 1 007

PLT. KEPALA SEKSI TATA RUANG
Edy Saputra, ST
NIP. 19770625 201001 1 015

- Gina Nawangwulan
NIP. 19760727 200903 2 006
- Frisda Sibaruna, ST,
NIP. 19880430 201101 2 003
- Wahyudi Nor
Naban

**PLT. KEPALA SEKSI PENATAAN
PERUMAHAN SWADAYA**
Gim Adhi Prabhawa, ST
NIP. 19871128 201101 1 003

- Revi Citrawaty HS, ST,
NIP. 19850321 200904 2 001
- Achmad Ridwanisyah
NIP. 19750907 200701 1 010
- Badaruddin
Naban

**KEPALA SEKSI WASBANG
PERUMAHAN & PERMUKIMAN**
Mulyono, ST,
NIP. 19610319 198808 1 001

- Tita Roslita
NIP. 19690319 199103 2 007
- Hairuddin
NIP. 19680305 201212 1 002
- Muhardi
NIP. 19710312 200701 1 025
- Boyke Norman Alfian
NIP. 19771116 200701 1 005
- Helmi Husriansyah
NIP. 19700614 200701 1 021
- Achmad Subaini
THL
- Muhammad Rizal
THL
- Irwani Sandrie
Naban
- Eko Satrya
Naban

KEPALA SEKSI TATA BANGUNAN
Nur Saenab, ST,
NIP. 19760416 200901 2 002

- Sadli Tirta Putra
NIP. 19730307 199803 1 003
- Saiful Baehi
NIP. 19710726 200604 1 005
- Abdul Hamid
NIP. 19731226 200701 1 014
- M. El Hakim
NIP. 19761103 200112 1 006
- Fuji Ralunjo
NIP. 19820131 200604 1 008
- Muchlas Adip
NIP. 19810908 201001 1 014
- Andi Marini Indriani, ST,
THL
- Basti Nuri
THL
- Avian Hendretriyono
Naban
- Qori Firdaus Mochdiat
Naban
- Muhammad Suprizal
Naban
- Nurdiansyah
Naban
- Rizqi Patra Yulandana
Naban
- Resty Yulianty
Naban

**KEPALA SEKSI PENATAAN
PERUMAHAN FORMAL**
Doriessiwati M.P.N.N, ST, MT
NIP. 19620329 199803 2 001

- Agus Rudi, ST,
NIP. 19720823 200604 1 016
- Hinawan Satya Nugraha
Naban
- Pandi Achmad
Naban

**KEPALA SEKSI PENGAWASAN
BANGUNAN UMUM**
Ir. H. M. Husien Nafarin, MM,
NIP. 19630307 199503 1 001

- Sukarianto
NIP. 19780716 200604 1 014
- Haudi Badhillah, ST
NIP. 19720907 199703 1 007
- Krisnaningrum
NIP.
Sabar
NIP. 19700103 200701 1 024

KEPALA UPT RUSUNAWA
Sutarno
NIP. 19670216 198703 1 005

KEPALA TU RUSUNAWA
Sudami
NIP. 19670505 198803 2 020

- Agus Surawan, A Mtd,
NIP. 19831031 201001 1 011
- Badaruddin
NIP. 19631231 1996031 116

